

# PEMBERDAYAAN NELAYAN SEBAGAI KEKUATAN PENANGKAL DI LAUT (STUDI KASUS NELAYAN JAKARTA UTARA)

Hari Bowo\*)

*Nelayan di Jakarta Utara dengan segala permasalahan yang dihadapi mempunyai kedudukan sebagai komponen cadangan kekuatan TNI-AL. Untuk itu potensi nelayan tersebut harus diberdayakan dalam rangka penangkalan di laut. Pemberdayaan nelayan Jakarta Utara yang efektif merupakan bagian dari pembangunan kekuatan pengganda dalam wujud komponen cadangan kekuatan TNI AL melalui suatu bentuk strategi penangkalan di laut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya berbagai ancaman, baik langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas kota Jakarta dalam kedudukannya sebagai pusat pemerintahan Indonesia.*

Nelayan Jakarta Utara sebagai kekuatan penangkal di laut merupakan bagian dari sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang harus dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepu-

luan terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang dimiliki mencapai 17.504 buah dengan wilayah laut yang mencapai 5.800.000 km<sup>2</sup>. Memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia sepanjang 81.000 km, dengan letak geografisnya yang sangat strategis di antara 2 benua (Asia dan Australia) dan 2 samudera (Hindia dan Pasifik). Kondisi geografis tersebut menempatkan Indonesia kaya akan sumber daya alam yang memiliki keanekaragaman hayati.

---

\*) Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

Namun luasnya wilayah laut yurisdiksi nasional berbanding terbalik dengan jumlah unsur-unsur TNI AL yang dimiliki, keterbatasan jumlah dan kemampuan Alutsista untuk mampu melindungi keseluruhan luasnya perairan adalah merupakan salah satu faktor utama yang menghambat TNI AL untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya secara optimal hingga saat ini. TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut dalam kurun waktu menuju postur TNI AL yang ideal tersebut, membutuhkan adanya dukungan dan partisipasi dari kekuatan maritim nasional lainnya. Kekuatan yang mampu melapisi kekurangan jumlah Alutsista yang dapat dihadirkan di laut yang terdiri dari armada niaga, armada perikanan, pelabuhan, industri jasa maritim maupun unsur-unsur pendukung lainnya yang termasuk dalam kategori kekuatan komponen pendukung pertahanan negara di laut. Keterlibatan unsur-unsur pendukung dalam bentuk dukungan secara langsung maupun tidak langsung kepada TNI AL dalam pelaksanaan tugas pokok mewujudkan kedaulatan negara di laut guna mewujudkan tercapainya tujuan nasional.

Kehadiran di laut bertujuan untuk menangkal tindakan-tindakan yang bermaksud akan

melakukan tindakan secara sepihak yang dapat merugikan kepentingan negara dan bangsa Indonesia dan di sisi lain yang dapat menguntungkan pihak/negara lain. Tindakan yang merugikan itu diantaranya hilangnya kedaulatan wilayah hingga tereksplotasinya kekayaan alam Indonesia secara illegal. Menghadirkan kekuatan TNI AL pada masa damai adalah untuk dapat mengendalikan laut yang dapat menjamin digunakannya media laut oleh para pengguna yang selalu tunduk dan taat pada ketentuan hukum laut internasional dan nasional yang berlaku.

Pemberdayaan terhadap komunitas nelayan selain untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang berarti mengentaskan mereka dari garis kemiskinan, juga dapat berarti menanamkan dan meningkatkan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara dalam bentuk rasa ingin untuk menjaga dan mengamankan keutuhan wilayah yurisdiksi perairan nasional dari ancaman musuh atau para pelaku pelanggaran hukum di laut. Rasa bela negara semestinya harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari media laut.

Nelayan dengan segala permasalahan sosial ekonomi yang



masih dan selalu menyertainya, merupakan suatu *entry point* bagi TNI AL untuk dapat melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut guna menjamin terlaksananya tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. Celah yang sedemikian kecil dan sempit itu akan memberikan suatu dampak yang demikian dahsyat, besar dan menguntungkannya bila pihak-pihak yang terkait mampu secara tepat memberdayakannya. Tepat dalam pemberdayaannya adalah tercapainya kesesuaian antara meminimalkan kelemahan akan penguasaan teknologi dengan kepedulian dan kearifan pemerintahan dalam bentuk pembangunan di sektor maritim secara lebih terarah dan terprogram.

Peran Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh TNI AL dalam menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara adalah dengan menjamin keamanan seluruh perairan yurisdiksi nasional dan bahaya ancaman kekerasan, pelanggaran hukum, penggalan sumber daya alam secara ilegal dan navigasi. Terwujudnya jaminan keamanan tersebut dapat memberikan daya tangkal terhadap kekuatan-kekuatan musuh yang berkepentingan dan berkehendak dalam pemanfaatan sumber daya di laut secara sepihak.

### **Geopolitik Laut Jakarta Utara**

Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 7.659,02 km<sup>2</sup> yang meliputi daratan seluas 661,52 km<sup>2</sup> termasuk sejumlah pulau besar dan kecil di Kepulauan Seribu yang mencapai 110 buah pulau. Sedangkan luas lautan meliputi 6.997,50 km<sup>2</sup> atau mencapai 90% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Jakarta. Di sisi lain Jakarta merupakan ibu kota negara dan juga merupakan pusat dari segala kekuatan, karena merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi, sehingga sangat rawan terhadap ancaman. Tanjung Priok adalah pelabuhan bertipe pelabuhan samudera yang memiliki fasilitas export import barang yang terletak di wilayah Jakarta Utara. Sebagai pelabuhan utama yang terdiri atas 7 (tujuh) pelabuhan meliputi ; Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan I, Pelabuhan II, Pelabuhan III, Pelabuhan Petikemas, Pelabuhan Koja, dan Pelabuhan Kali Baru. Di samping ke tujuh pelabuhan utama tersebut terdapat pula pelabuhan minyak Pertamina sebagai pelabuhan pendistribusian minyak dan pelabuhan Bogasari sebagai pelabuhan pendistribusian tepung. Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan bertipe nusantara (antar pulau) terletak ± 8 km di sebelah Barat Tanjung Priok. Dermaga yang terda-



pat di pelabuhan Sunda Kelapa adalah pelabuhan lama yang diprioritaskan bagi Pelayaran Rakyat (Pelra) dan dermaga baru yang dapat digunakan oleh kapal-kapal non Pelra. Selain itu terdapat pelabuhan khusus yaitu Pelabuhan Ikan Muara Baru sebagai pelabuhan yang khusus melaksanakan kegiatan bongkar muat ikan hasil tangkapan kapal ikan maupun kapal nelayan.

Melihat banyaknya jumlah pelabuhan yang terdapat di Tanjung Priok menunjukkan bahwa begitu banyaknya volume barang yang harus dibongkar dan didistribusikan dengan memanfaatkan segala fasilitas yang terdapat di pelabuhan Tanjung Priok. Padatnya kapal-kapal yang memanfaatkan fasilitas tersebut yang mencapai 16.000 kapal/tahun sesuai laporan Pelindo II/Jakarta tahun 2008. Kepadatan kapal yang akan melaksanakan bongkar muat mengharuskan kapal-kapal tersebut untuk berlabuh dahulu di luar pintu masuk pelabuhan Tanjung Priok.

Masih di dalam area pelabuhan Tanjung Priok terdapat dermaga yang dimiliki oleh TNI AL (Kormabar) dan Polri (Airud) yang berada di Pondok Dayung. Instansi lain yang memanfaatkan pelabuhan Tanjung Priok sebagai tempat beraktifitas di antaranya Bea Cukai, Direktorat Per-

hubungan Laut dan Imigrasi. Dermaga Pondok Dayung selain dilengkapi dengan fasilitas standar yang memadai, juga dilengkapi dengan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan khusus bagi unsur-unsur KRI. Terdapat pula markas komando Pasukan Katak TNI AL sebagai satuan pasukan khusus TNI AL yang berkemampuan melaksanakan aksi sabotase bawah air dan anti teror di laut.

Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan dan menegakkan hukum serta menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, khususnya di wilayah perairan Barat Indonesia. Penunjukan Jakarta sebagai lokasi Markas Koarmabar dengan mempertimbangkan nilai strategis Jakarta sebagai ibukota negara dan sekaligus ketersediaan fasilitas pendukung yang dimiliki. Dengan luasnya tugas yang harus diemban oleh Koarmabar tersebut maka postur Armada RI Kawasan Barat yang ada saat ini belum mampu mewujudkan daya tangkal di laut yang kuat sebagai implementasi dari strategi penangkalan yang dilaksanakan. Ketidakmampuan Koarmabar untuk mewujudkan daya tangkal yang kuat di laut

karena beberapa keterbatasan Alutsista yang dimiliki. Keterbatasan yang ada dapat dilihat dari aspek kuantitas bila dihadapkan dengan luasnya wilayah perairan yurisdiksi nasional yang harus dijaga. Sedangkan dari aspek kualitas bila dihadapkan dan dibandingkan dengan ancaman berupa teknologi yang berasal dari aktor negara maupun aktor bukan negara.

Berdasarkan data operasi tahun 2008 yang direncanakan oleh Staf Operasi Mabes TNI AL, maka hanya terdapat satu operasi (Operasi Rakata Jaya) yang secara konsisten menempatkan perairan Teluk Jakarta sebagai daerah operasi. Operasi yang digelar dapat dikatakan masih belum menjamin terselenggaranya keamanan di laut dengan hanya didukung oleh 3 KRI yang terdiri atas 1 KRI jenis FPB, 1 KRI jenis PC dan 1 KRI jenis AT/F yang kesemuanya tidak berkemampuan sebagai pemukul strategis. Dengan luasnya daerah operasi yang harus dilindungi ( $\pm 6.997,50 \text{ km}^2$ ) oleh 3 buah KRI, maka satu KRI harus mampu melindungi luas area sejauh  $\pm 2.330 \text{ km}^2$ . Keterbatasan lain yang sangat mempengaruhi kemampuan kehadiran unsur KRI di laut adalah kemampuan dukungan bahan bakar yang dimiliki, dengan kapasitas tangki bahan bakar dihadapkan dengan

ketersediaan dukungan bahan bakar yang diberikan, maka rata-rata kemampuan berlayar KRI di laut hanya maksimal  $\pm 4$  hari.

### **Perberdayaan Nelayan Jakarta Utara**

Keadaran bela negara nelayan Jakarta Utara cukup baik, hal ini tercermin dari parameter kesediaan nelayan untuk digerakkan/dimobilisasi sebagai komponen cadangan TNI jika negara dalam keadaan perang dan kesediaan untuk membantu tugas-tugas TNI AL bila terjadi perang dengan memberikan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan TNI AL. Tingkat kesadaran bela negara nelayan berkorelasi upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat, khususnya TNI AL dalam pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan Hankamneg di bidang maritime. Oleh karena itu peran serta TNI AL masih dapat ditingkatkan agar kesadaran bela negara khususnya masyarakat nelayan yang masih rendah menjadi meningkat.

Potensi yang dapat dikembangkan sebagai bagian kekuatan dalam komponen cadangan antara lain sebagai pengumpul data intelijen, pendukung penggeseran angkut personel pasukan khusus, pendukung angkutan barang terbatas, pendukung tugas pencarian dan

penyelamatan di laut dan pendukung aksi tempur terbatas penyebar ranjau.

Pembangunan daya tangkal nelayan Jakarta Utara sebagai suplemen kepada kekuatan utama/TNI meliputi 3 aspek sebagai berikut: (1) Membangun kemampuan nelayan dalam penangkalan di laut, khususnya berkaitan dengan 5 potensi yang dapat dikembangkan di atas (2) Membangun kredibilitas penangkalan dengan melahirkan karakter pemimpin nasional yang berwawasan maritime. (3) Meningkatkan komunikasi dalam hubungannya dengan wawasan nusantara dan Ketahanan Nasional.

Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia yang tentunya sebagai *center of gravity* perlu adanya prioritas pertahanan dan keamanan bukan hanya oleh Pemerintah saja namun perlu adanya kesadaran bela negara dari para nelayan sebagai komponen cadangan. Untuk meningkatkan pemberdayaan nelayan sebagai komponen cadangan dan kekuatan penangkal di laut, diprioritaskan pembinaan kepada masyarakat nelayan yang kesadaran bela negarnya masih rendah. Sedangkan untuk nelayan yang kesadaran bela negaranya sudah baik disarankan untuk ikut dilibatkan dalam berbagai latihan

yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan agar potensi kemampuan penangkalan yang dimilikinya meningkat, sehingga kredibilitas penangkalnya juga ikut meningkat.

Sedangkan pada aspek kesejahteraan nelayan, dapat diusulkan program pemberdayaan nelayan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang jadi *core program* dengan prioritas persoalan nelayan yang harus dikerjakan yaitu pertama bagaimana jumlah tangkapan menjadi bernilai ekspor, kedua teknologinya yang amat minim ditingkatkan, ketiga areal tangkapan yang terbatas diperluas dengan dukungan regulasi. Setelah itu baru pada hal-hal yang berkaitan dengan lintas sektoral.

Keterbatasan jumlah KRI dan anggaran untuk dukungan perawatan dan logistik guna mengamankan perairan Teluk Jakarta yang luas, maka perlu adanya dukungan dari nelayan untuk digunakan sebagai kekuatan pengganda. Dengan medan juang dan pengabdian yang relatif sama antara nelayan dan TNI AL, maka profesi nelayan Jakarta Utara dapat menjadi bagian dari komponen pendukung TNI AL.

Mengingat kesadaran bela negara nelayan Jakarta Utara pada umumnya cukup baik dan berkorelasi dengan pembinaan



yang dilakukan oleh TNI AL selama ini, maka pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan Hankamneg di bidang maritim agar lebih difokuskan kepada nelayan yang belum menerima pembinaan. Sedangkan dari aspek kesejahteraan konsep pemberdayaan nelayan harus lebih dititik beratkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran para nelayan. Karena nelayan menjadi obyek pembinaan dari berbagai Departemen/Instansi, maka perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang terintegrasi dengan baik. Sedangkan dari aspek legislasi perlu adanya UU tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

### Daftar Pustaka

- Beaufre, Andre, 1963, *Deterrence and Strategy*, Frederick A. Praeger, New York.
- Bruner, 1974, *Hipotesa Kebudayaan Dominan*, Tavistock, London.
- Dephan, 1998, *Strategi Penangkalan Pertahanan Keamanan Negara*, Dephan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Panduan Penyelenggaraan Bela Negara*, Dephan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Keamanan Nasional*, Dephan, Jakarta.
- Dinas Kelautan Dan Perikanan, 2000, *Kajian Strategi Pembinaan Wilayah Laut*, DKP,

Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2008, *Perikanan Tangkap Indonesia Dari Masa ke Masa Untuk kesejahteraan Bangsa Indonesia*, DKP, Jakarta.
- Dahuri, Rockhmin, 2004, *Perjuangan Anak Nelayan Membangun Kelautan dan Perikanan*, Bening, Jakarta.
- Grorgy, Andrew. 1971, *Geopolitice*.
- Kusnadi, 2008, *Jaminan Sosial Nelayan*, LKS, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Keberadaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Akar Kemiskinan Nelayan*, LKS, Yogyakarta.
- Mahan, AT, 1890, *The Influence of Sea Power up on History*, Little, Brown and Company, London.
- Poerwadi, Soegeng, 1998. *Konsep Pembinaan Nelayan Desa Pantai Dalam Rangka Mendukung Hankamneg di Laut*, Seskoal, Jakarta.
- Roskill, Sw, 1962, *The Strategy of Sea Power*, ST James'S Place, London.
- Seskoal, 1990, *Synopsis Sea Power of The State dari Sergei Groskov*, Seskoal, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Pengkajian Teori Kekuatan Laut AT Mahan serta Relevansinya Terhadap Pembangunan Kekuatan Laut*



- Indonesia, Seskoal, Jakarta.*
- \_\_\_\_\_, 1994, *Teori Pembangunan Kekuatan*, Seskoal, Jakarta.
- Soewarso, 1986, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Penangkalan*, Seskoal, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Kumpulan Karangan tentang Revolusi Pemikiran Masalah Keangkatan Lautan*, Seskoal, Jakarta.
- Siswanto, Budi, 2008, *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*, Laksbang Mediatama, Malang.
- Sahli Kasal, 2006, *Pertahanan dan Keamanan di Asia Pasifik*, Sahli Kasal, Jakarta.